

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada masa lalu peranan pemerintah pusat dalam setiap urusan daerah sangat dominan, mulai dari aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, khususnya untuk lingkup pekerjaan yang dianggap besar oleh pusat, ditangani oleh Jakarta. Daerah dianggap sebagai ruang hampa dan menerima apa saja yang ditentukan oleh pusat. Pusat menguasai hampir semua potensi pendapatan yang gemuk yang ada di daerah, baik hasil sumber daya alamnya maupun dari sektor perpajakan. Akibatnya uang banyak mengalir ke pusat, tetapi hanya sebagian yang didistribusikan ke daerah. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2001, pemerintah RI secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralistik dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembagunan nasional.

Menurut Hidayat syarief (2000), Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang pengelolaan pembangunan lebih banyak kepada pemerintah daerah, terutama di kabupaten/kota. Menurut UU No.25 tahun 1999, Otonomi daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah meliputi Desentralisasi Pembangunan dan Desentralisasi Fiskal. Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah setempat menurut kebijakan sendiri berdasarkan masukan dan potensi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal desentralisasi pembangunan, otonomi daerah dilakukan melalui pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah terutama kabupaten/kota. Melalui desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan wewenang pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Untuk itu pemerintah memberikan alokasi keuangan baru untuk daerah yang dinamakan Dana Perimbangan yang terdiri atas tiga unsur yaitu: Bagian untuk daerah dari hasil pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebenarnya otonomi daerah ini sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Dalam pasal 18 Undang-Undang dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut merupakan dasar yang kuat untuk terselenggaranya otonomi daerah melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sistem pemerintah sesuai pasal 18 Undang

Undang Dasar 1945 ini baru bisa terlaksana setelah orde baru pada tahun 1999. Berbagai alasan atau latar belakang yang mendorong pemberlakuan otonomi daerah tersebut antara lain adalah faktor historis, gerakan reformasi, dan globalisasi ekonomi dunia. Walaupun otonomi daerah merupakan keinginan banyak orang terutama di daerah, tetapi dalam pelaksanaannya saat ini masih ditemukan berbagai persoalan dalam implementasinya, seperti keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi keputusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa daerah mempunyai hak untuk mendapatkan sumber keuangan yaitu: adanya pendanaan yang pasti bersumber dari pemerintah berhubungan dengan urusan pemerintah yang dipercayakan, dengan adanya tujuan itu Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemerintah harus menyalurkan sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatannya dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kesempatan besar bagi daerah untuk mengolah sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh suatu daerah agar dapat menyumbangkan hasil yang sebanyak-banyaknya dan terbaik untuk meningkatkan pendapatan sebuah daerah. Setiap pemerintah daerah berusaha

keras untuk membuat peningkatan perekonomian bagi daerahnya sendiri termasuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan gambaran dari kemandirian suatu daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dan optimal. Di sisi lain pemanfaatan terhadap sumber PAD yang sudah ada harus dimaksimalkan dan daerah juga harus selalu mampu menggali sesuatu yang baru untuk mencari dan mengembangkan kemampuan sumber-sumber PAD sehingga sebuah daerah semakin kaya dengan sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang berguna dalam pembangunan daerahnya sehingga memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk memperoleh hasil dari sumber daya alam yang dimiliki agar dapat mendapatkan hasil yang optimal. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang yaitu dengan mengoptimalkan kemampuan dan peluang sumber PAD yang berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata di Kota Padang berpeluang sangat besar untuk meningkatkan PAD dan perlu diteliti guna mencapai PAD yang optimal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata penting karena Kota Padang memiliki banyak tempat wisata yang mampu menarik wisatawan datang ke Kota Padang, ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang datang setiap tahunnya ke Kota Padang. Selain itu kota Padang mempunyai banyak hotel dan

restoran yang dapat dikembangkan dan dapat mendukung aspek pariwisata dalam menyediakan fasilitas bagi wisatawan untuk menginap dan makan. Sangat diharapkan dengan banyaknya wisatawan yang menginap di hotel dan makan di restoran ini akan meningkatkan pendapatan dari sisi pajak.

Kota Padang mempunyai daya tarik tersendiri dalam kegiatan usaha kepariwisataan bagi wisatawan domestik dan internasional sehingga sering menjadi tempat tujuan wisata. Potensi wisata di kota Padang ini juga harus disadari oleh pemerintah agar pemerintah mengusahakan pengembangan berbagai tempat wisata di kota Padang. Pengembangan pariwisata di suatu daerah terkhususnya di Kota Padang menghasilkan manfaat ekonomi termasuk devisa bagi Kota Padang dan negara, peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan pemerintah. Pariwisata juga melindungi lingkaran fisik dan sosial kebudayaan setempat, dengan berkunjungnya wisatawan kesuatu daerah maka semakin banyak yang mengenal budaya daerah itu dan dapat menjadi nilai jual yang apabila ingin berlanjut maka harus dipertahankan.

Saat ini Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara untuk berkunjung, ini terlihat dari pintu masuk melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berada pada peringkat ke-9 dari 19 pintu masuk bandara di Indonesia. Potensi pariwisata ini tidak hanya disadari oleh pemerintah, tetapi juga dari banyak pihak swasta yang terlihat dari semakin banyaknya dibangun hotel dan restoran di kota Padang. Dengan adanya berbagai *event* yang diadakan di wilayah ini baik tingkat nasional maupun internasional seperti Tour de Singkarak (TDS) berdampak sekali untuk kunjungan wisatawan ke Sumbar karena tempat-tempat menarik juga ikut ditayangkan di media nasional

hingga internasional, hal ini menjadikan kondisi pariwisata Sumbar mengalami kemajuan pesat setiap tahunnya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar pada tahun 2015 yaitu 38,21% (Dinas kebudayaan dan Pariwisata, 2016).

Kota Padang sebagai ibukota Sumatera Barat mempunyai wisata yang sangat beragam yang terdiri dari berbagai macam pilihan, mulai dari taman rekreasi, wisata budaya dan bahari berupa pantai dan pulau, gunung, tempat-tempat peninggalan sejarah yang sangat banyak dan memiliki nilai sejarah yang tinggi ditambah dengan terselenggaranya berbagai atraksi pariwisata serta kegiatan kesenian dan kebudayaan di beberapa kawasan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “Destinasi Pariwisata”. Kuliner kota Padang yang sudah terkenal di taraf nasional dan internasional juga memegang peranan yang sangat penting sehingga menjadikan kota Padang memiliki daya tarik sendiri sebagai destinasi pariwisata yang patut dikunjungi. Pariwisata, hotel dan restoran mempunyai kaitan yang sangat erat satu sama lain. Hal ini dikarenakan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Padang, maka akan semakin banyak kebutuhan akan penginapan (Hotel, dll) dan juga akan meningkatkan permintaan terhadap kuliner khas Padang atau konsumsi para wisatawan yang disesuaikan dengan selera di kota Padang.

Nirwandar (2006) menegaskan bahwa sektor pariwisata semakin dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa pembangunan dan Menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang merupakan sumber PAD adalah industri pariwisata yang dimiliki masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan

dikembangkannya CTD pemerintah daerah dapat menggali kesempatan pendapatan dari pajak dan bermacam-macam retribusi resmi dari sektor industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang mencakup hotel, restoran, usaha wisata, usaha biro perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan (formal dan informal), transportasi dan pengadaan pelatihan.

Pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memiliki cara kerja dan pengaturan yang lengkap karena mengatur pergerakan wisatawan dari suatu daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, dan kembali ke negara atau daerah asalnya yang melibatkan berbagai bagian seperti transportasi, biro perjalanan, pemandu wisata (*guide*), tour operator, akomodasi, artshop, money changer, restoran/kuliner, penginapan dan yang lainnya. Pariwisata juga menyediakan berbagai jenis produk dan wisata yang beragam, seperti wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah, wisata budaya, hingga beragam wisata dengan minat khusus.

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan di suatu daerah, bernilai positif karena akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, kepariwisataan sebagai komponen utamanya serta memperhatikan juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik dalam negeri maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, besar kecilnya pajak hotel dan restoran, dan besar kecilnya retribusi obyek wisata. Menurut Spillane (1994), dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi berdampak kepada penyediaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan.

Walaupun industri pariwisata bukan menjadi industri yang mendapat prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun industri pariwisata bisa menjadi industri pendukung yang sangat potensial dalam memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah, seharusnya dengan meningkatnya jumlah fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan dan jasa perjalanan pariwisata yang ditawarkan, jumlah pengunjung dan pendapatan dari industri pariwisata di Kota Padang juga dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kota Padang.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang peranan sektor pariwisata sebagai suatu sektor yang sangat mempengaruhi PAD Kota Padang. Selain itu penulis juga mengkaji sektor-sektor yang dapat mempengaruhi PAD kota Padang. Penelitian ini akan dikaji dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Padang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya**”

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah tersebut, serta untuk melihat pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah seberapa besar jumlah PAD yang berasal dari sektor pariwisata tersebut. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah melalui alur PAD industri pariwisata. Kota Padang memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya

jumlah hotel dan restoran di Kota Padang selama beberapa tahun terakhir. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Dari uraian diatas maka di rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh jumlah wisatawan, perilaku pemerintah sektor pariwisata , dan PDRB sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan, perilaku pemerintah, dan PDRB sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini manfaat yang dapat diambil yaitu:

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dengan adanya perkembangan sektor pariwisata saat ini. Sebagai contohnya : masyarakat di sekitar lokasi tempat wisata dapat membuka usaha untuk menambah penghasilan mereka. Selain itu dengan adanya perkembangan pariwisata masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga budaya agar tetap memiliki nilai yang tinggi di mata wisatawan.

2) Bagi Pengusaha dan Investor

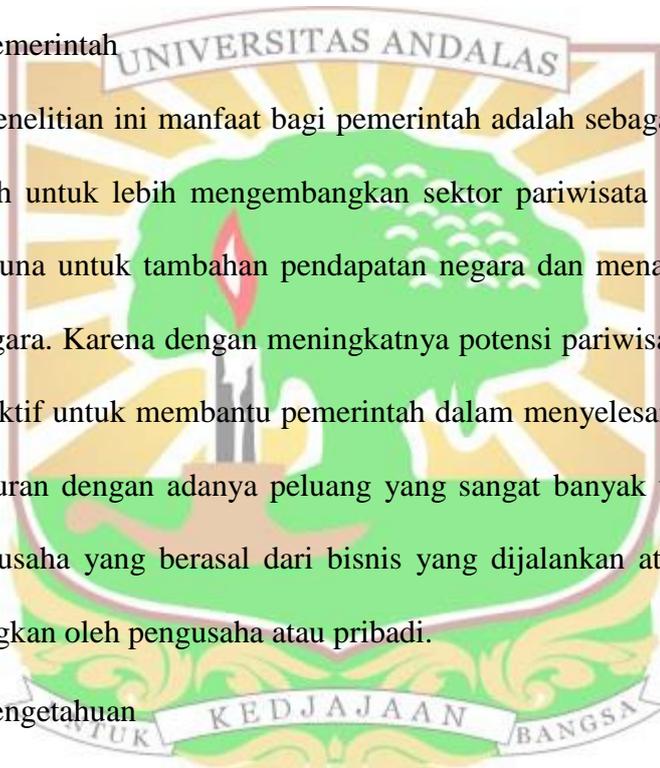
Bagi para pengusaha penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk mengembangkan bisnis yang mereka jalankan baik di sektor pariwisata ataupun bagi pengusaha baru yang akan menjalankan bisnis di bidang pariwisata. Bagi para investor penelitian ini berguna untuk melihat potensi besar pariwisata di Kota Padang, sehingga dapat membantu perkembangan pariwisata suatu daerah melalui investasi pemerintah maupun swasta.

3) Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai masukan bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata di Kota Padang yang berguna untuk tambahan pendapatan negara dan menambah cadangan devisa negara. Karena dengan meningkatnya potensi pariwisata Kota Padang sangat efektif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dengan adanya peluang yang sangat banyak untuk membuka lapangan usaha yang berasal dari bisnis yang dijalankan atau yang sedang dikembangkan oleh pengusaha atau pribadi.

4) Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. Selain itu dapat juga memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai jumlah wisatawan, perilaku pemerintah, dan lingkungan ekonomi (PDRB) sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah di kota Padang. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menambah kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata.



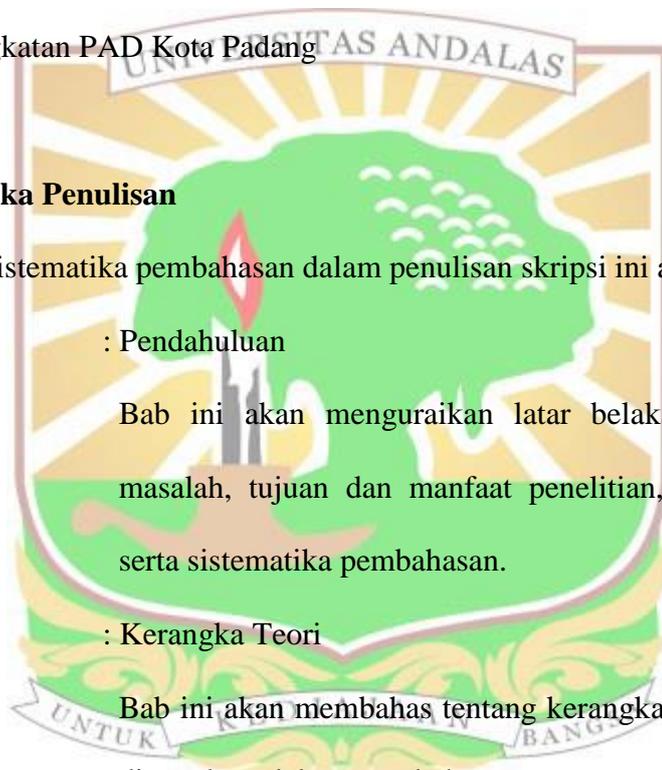
1.5 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang ruang lingkup perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka ditentukan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian sehingga diharapkan tidak keluar dari topik yang akan dibahas. Fokus penelitian ini akan dititikberatkan padang bidang pengaruh kedatangan wisatawan dalam pengembangan pariwisata dan factor-faktor yang mempengaruhinya terkait dengan peningkatan PAD Kota Padang

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah

- BAB I : Pendahuluan
- Bab ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Kerangka Teori
- Bab ini akan membahas tentang kerangka teori yang akan digunakan dalam pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.
- BAB III : Metodologi Penelitian
- Bab ini membahas tentang metode analisis data dan sumber data yang digunakan.
- BAB IV : Gambaran umum



perkembangan sektor pariwisata di Kota Padang dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan penjelasan mengenai hasil penelitian.

BAB VI : Penutup

Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran-saran.

